



Memikir Ulang Ekonomi Sawit

Oleh: Madani Berkelanjutan





**PENENTUAN HARGA TBS
MELALUI INDEKS K
BELUM BERPIHAK PADA
PETANI SAWIT**

- 🔥 Biaya pengurusan di pelabuhan dan penjualan;
- 🔥 Biaya penyusutan pabrik;
- 🔥 Biaya administrasi (Bunga bank dsb);
- 🔥 Biaya umum di pabrik dan biaya pengolahan limbah;
- 🔥 Biaya pemasaran produk
- 🔥 Biaya operasional tidak langsung dalam bentuk cost of money
- 🔥 Biaya pemeliharaan pabrik; biaya pengemasan; asuransi pabrik; gaji dan tunjangan staf
- 🔥 Biaya pengangkutan ke pelabuhan



"Harga TBS petani sawit jauh lebih rendah dari pada semestinya"

"Penggunaan Dana Perkebunan Sawit belum Memberikan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani Sawit"



**11 Trilyun
Dana Sawit**

(KPK, 2017)

Kebijakan yang diambil



80,1% subsidi Biodiesel

Impact

dimaksudkan agar produksi biodiesel di dalam negeri meningkat sehingga mampu menyerap produksi CPO. Meningkatnya permintaan CPO akan mampu mendongkrak harga CPO dan implikasi lainnya, harga TBS ditingkat petani meningkat. Pada akhirnya, akan meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sawit.

**Belum Mampu
Mensejahterakan Petani**

Tahun	Harga TBS Acuan Pemerintah Provinsi Riau (Rp/Kg)	Harga CPO Belawan (Rp/Kg)	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat
2013	1.557	8.331	95,4
2014			
2015			
2016	1.756	8.352	98,0
2017			
2018			
2019			

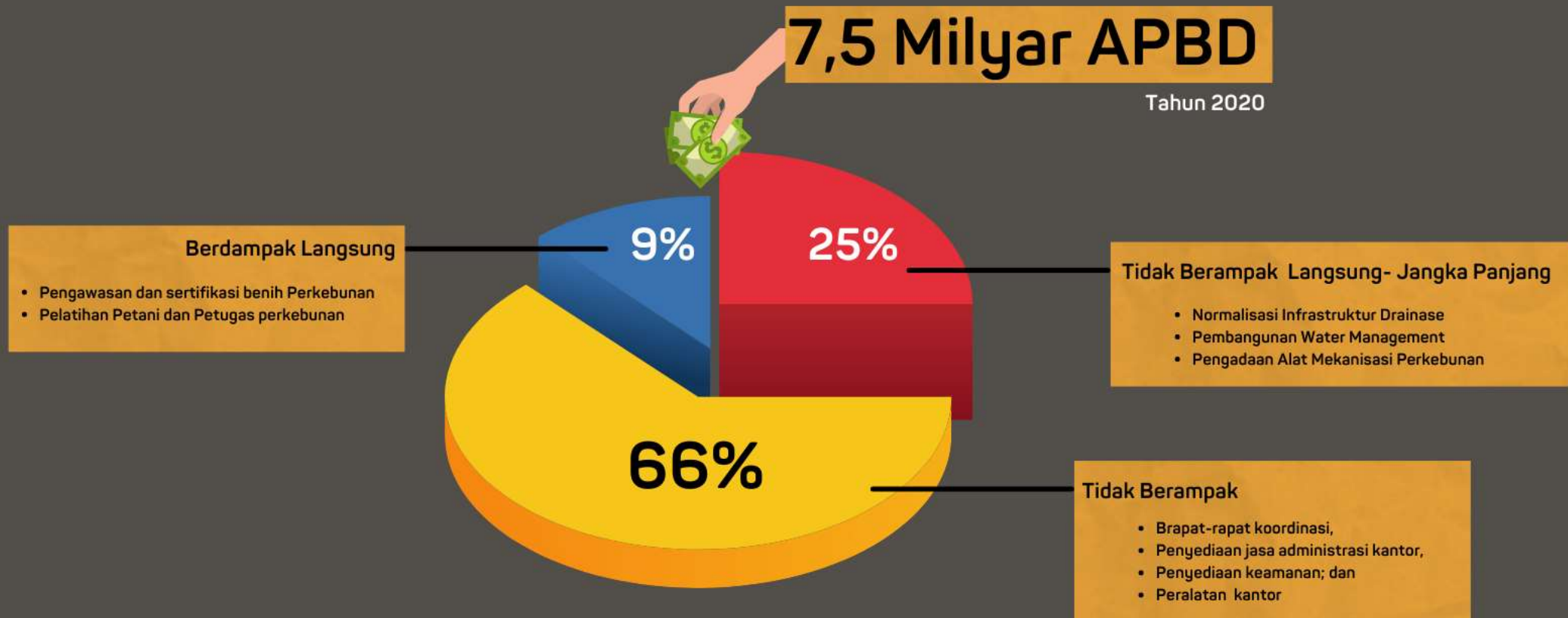
Andai, Dana sawit lebih diperuntukkan bagi petani sawit apakah yang terjadi?

Sektor Produksi	Pertumbuhan Output (Skenario)	
	1	2
Faktor Produksi Tenaga Kerja	0,59%	0,31%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	0,32%	0,38%
Institusi Rumah Tangga	0,50%	0,31%
Institusi Perusahaan	0,32%	0,37%
Institusi Pemerintah	0,23%	0,25%
Sektor Produksi Lainnya*	0,29%	0,21%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	6,52%	0,47%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	0,32%	1,23%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	0,37%	0,24%
Komoditas Domestik	0,30%	0,21%
Komoditas Impor	0,09%	0,09%



Analisis input-output menunjukkan bahwa penggunaan dana perkebunan sawit untuk membiayai subsidi biodiesel tidak memberikan nilai manfaat besar terhadap keseimbangan faktor produksi dibandingkan menggunakannya untuk program yang berkaitan langsung dengan pengembangan sektor perkebunan sawit.

Komitmen Anggaran bagi Kesejahteraan Petani di Provinsi Sentra Sawit



SAWIT LUAS, DAERAH DAPAT APA?



100% ✓

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari sawit



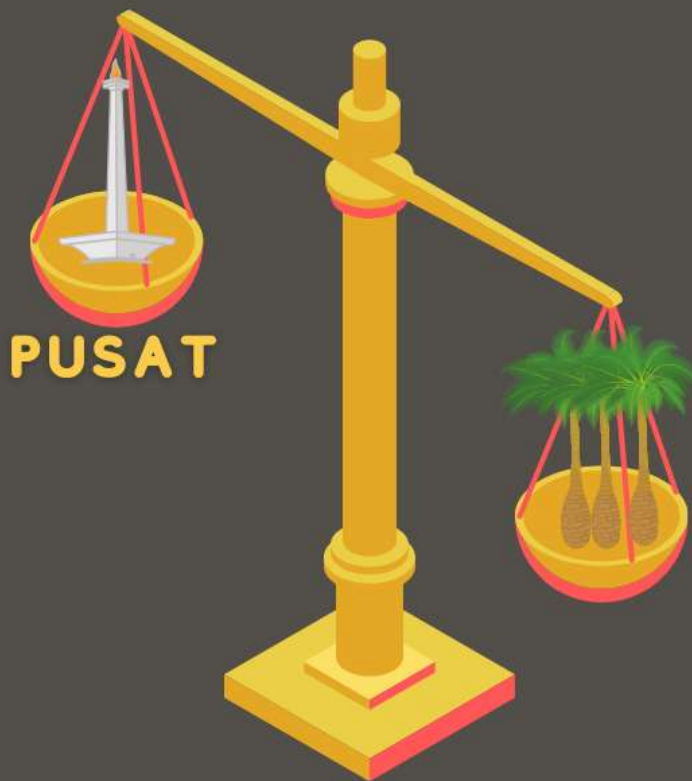
100% ✓

Hasil pungutan ekspor (dana sawit)



PBB ✓

Pemerintah pusat mendapatkan 10% dari PBB
sawit dan 9% untuk pemungutan



0% ✗

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari sawit



0% ✗

Dana Bagi Hasil (DBH)
sebab, sawit tidak masuk
DBH sektor sumber daya alam



PBB ✓

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari
sawit 16,2% untuk provinsi dan 64,8%
untuk Pemkab/ Pemkot. Namun, jumlah
PBB yang ditanggung perusahaan sawit
lebih kecil dari tanggungan PBB orang
miskin di DKI Jakarta.

Potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebesar 191 miliar rupiah di Riau dan 660 miliar rupiah Kalbar



Bersumber dari Tutupan Sawit yang belum Ber-HGU.

Riau= 279 ribu Ha
Kalbar= 1, 3 Juta Ha



Riau dan Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam menggenjot penerimaan PBB Perkebunan Sawit



Provinsi	Total Luas (Ha)	Rata-Rata PBB Perkebunan/Ha	Potensi PBB Perkebunan Sawit (Rupiah/Tahun)
Riau	2,3 Juta	33.024	74,5 Milyar
Kalimantan Barat	4,5 Juta	17.036	76 Milyar

• Total Luas IUP

Urgensi yang tinggi bagi Direktorat Pajak dan Pemda untuk melakukan pertukaran data dan informasi.





Unduh nawala terbaru kami di www.madaniberkelanjutan.id